

MERANCANG MANAJEMEN AGRIBISNIS SYARIAH DI DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Susi Melinasari¹, Hasbi Ash Shiddieqy², Siti Jaojah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹susimelinasari@febi-inais.ac.id, ²hasbi.as@febi-inais.ac.id, ³sitijaojah2019@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to Design a Sharia Agribusiness Management in Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency. This community service uses the method of discussions and participation. The agribusiness system includes the provision of production facilities, agro-industry/product processing systems, support systems, development of the agribusiness sector, development of agribusiness infrastructure, and guidance and empowerment as an effort to overcome the food crisis.

Key Words: Agribusiness Management, Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk Merancang Manajemen Agribisnis Syariah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pengabdian kepada masyarakat ini bermetode diskusi dan partisipasi. Sistem agribisnis meliputi penyediaan sarana produksi, sistem agroindustri/pengolahan hasil, sistem penunjang, pengembangan sektor agribisnis, pengembangan infrastuktur agribisnis, dan pembinaan serta pemberdayaan sebagai upaya penanggulangan krisis pangan.

Kata-kata Kunci: Manajemen Agribisnis, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun tumbuh dengan positif. Namun jumlah tingkat kemiskinannya juga masih relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 tercatat jumlah angkatan kerja di provinsi Jawa Barat kabupaten/kota Bogor sebanyak 24,82 juta orang dengan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 8,35% dan jumlah penduduk miskin sebesar 4 juta orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran masih sangat besar sehingga menyebabkan kemiskinan yang tak bisa dibendung.

Ada beberapa permasalahan mendasar yang di alami oleh petani menurut apriyantono (2009) adalah kurangnya permodalan yang dimiliki baik itu teknologi maupun organisasi tani yang masih lemah. Dalam hal ini pemerintah mengatasi permasalahan ini dengan menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebagai salah satu upaya agar pertanian di Indonesia yang umumnya *profitable* tetapi belum *blaktable*. Terinspirasi dari keberhasilan Yunus dalam mengembangkan Grameen Bank di Bankladesh, PUAP merupakan program rintisan untuk menumbuh kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKMA dengan prinsip bagi hasil atau skema *profit loss sharing* secara syariah.

Petani anggota, petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang di gabungkan dalam kelompok tani (gapoktan) diberikan fasilitas modal usaha berbentuk PUAP. Bantuan dana tersebut diberikan kepada tiap desa/gapoktan senilai 100 juta melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menjadi modal awal kelompok tani dalam simpan pinjam. Tumbuh dan berkembangnya LKMA PUAP menjadi indikator yang sangat penting dalam kemajuan dan keberhasilann program PUAP secara keseluruhan.

Kurun waktu tiga (3) tahun yaitu priode 2008-2011, PUAP telah di laksanakan di 38.123 desa/gapoktan sebagai pusat pertumbuhan agribisnis di pedesaan (Hendriawan, 2011). Dalam pelaksanaan nya gapoktan ini memiliki perkembangan yang bervariasi disetiap desanya. Ada yang tumbuh menjadi LKMA, ada yang berupaya tumbuh menjadi LKMA, ada yang masih PUAP dan masih ada yang menjadi gapoktan pelaksana simpan pinjam anggota.

Menurut hasil evaluasi yang di lakukan oleh tim PUAP pusat, saat ini sudah terbentuk sekitar 3.000 LKMA yang tersebar

di seluruh pelosok Indonesia (Hedriawan, 2011). LKMA ini dalam skema pelaksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu ada yang memakai dengan skema simpan pinjam bunga, dan ada yang memakai skema sistem bagi hasil *loss sharing* atau sistem keuangan syariah (Sudaryo, 2009).

Banyak hal yang menarik untuk dicermati ialah bahwa hampir separuhnya yaitu 2267 sudah berbentuk LKMA dari total 4665 gapoktan PUAP selama priode 2008-2011 secara nasional jumlah ini setara dengan 75,6 %. Dari jumlah itu, sekitar 278 atau 12,66% LKMA di Jawa Tengah beroperasi dengan skema pembiayaan Syariah. Desa Gunung sari juga memiliki gapoktan yang di beri nama POKTAN KAUM TANI JATMIKA. Poktan ini di berikan agar dapat memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhan dalam bertani, contohnya pemudahan dalam pengadaan pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pupuk ZA, pupuk SP3G.

Dalam praktiknya Poktan di Desa Gunung Sari ini berskema simpan pinjam dengan bunga, dimana para petani diberi kesempatan untuk diberikan pengadaan barang dalam bertani, seperti pupuk dan yang lainnya, dibayarkan setelah panen. Dalam hal ini desa Gunung Sari belum menerapkan poktan yang berskema syariah atau *loss sharing*. Berdasarkan hal tersebut, pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan merancang manajemen agribisnis syariah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Agribisnis.

Agribisnis sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur aling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Disini dapat diartikan bahwa agribisnis terdiri dari berbagai sub sistem

yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara regular serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Adapun 5 mata rantai agribisnis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subsistem penyediaan sarana produksi. Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran, dalam kegiatan ini menyangkut perencanaan, pengelolaan, dan sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usaha tani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat produksi, tepat jumlah dan tepat mutu.
2. Subsistem usaha tani atau proses produksi. Subsistem usaha tani atau proses produksi ini menyangkut pembinaan dan pengembangan primer pertanian. Yang termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas teknologi, dalam rangka meningkatkan produksi primer. Dalam hal ini ditekankan untuk meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin tanpa harus merusak kaidah kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan usaha tani berbentuk komersial bukan subsistem artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka.
3. Subsistem agroindustri/pengolahan hasil. Lingkup subsistem agroindustri/ pengolahan hasil ini tidak hanya pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan keseluruhan dari mulai pasca panen sampai tingkat pengolahan lanjutan. Dengan

demikian proses pengupasan, pembersihan, pengekstrasian, panggilan, pembekuan, pengeringan dan peningkatan mutu..

4. Subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan ini mencakup pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market baik domestik maupun luar negeri.
5. Subsistem penunjang. Subsistem ini merupakan kegiatan penunjang baik pra panen maupun pasca panen.
 - a. Sarana tataniaga
 - b. Perkreditan
 - c. Penyuluhan agribisnis
 - d. Koperasi agribisnis
 - e. BUMN
 - f. Swasta
 - g. Penelitian dan pengembangan
 - h. Pendidikan dan pelatihan
 - i. Transportasi
 - j. Kebijakan pemerintah

II.2. Strategi Pengembangan Sistem Agribisnis.

Pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, secara simultan dan harmonis. Hal ini dapat diartikan bahwa keduanya ini saling berkesinambungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Yang selama ini kita dapatkan pada agroindustri adalah bahwa bahan baku yang didapatkan berasal dari luar negeri atau *import* dan tidak memakai bahan baku dalam negeri yaitu pertanian itu sendiri.

Membangun agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing diatas keunggulan komperatif yaitu melalui informasi yang digerakkan oleh inovasi sehingga melalui pembangunan agribisnis

akan mampu menginformasikan produk Indonesia yang berbasis pertanian.

Membangun sistem agribisnis melalui pengembangan industri perbenihan. Industri perbenihan merupakan pokok utama dalam pembentukan atribut produk agribisnis secara keseluruhan. Atribut tersebut menyangkut atribut nutrisi kandungan zat-zat nutrisi. Dan atribut nilai seperti ukuran penampakan, aroma rasa dan lain sebagainya. Untuk membangun rencana pembenihan diperlukan pengembangan stategis secara nasional. Untuk itu pemerintahan desa Gunung Sari harus mengembangkan usaha perbenihan (benih komersial).

Dukungan industri agro-otomotif dalam pengembangan sistem agribisnis. Dalam rangka modernisasi agribisnis daerah perlu pengembangan banyak jenis dan ragam produk industri untuk kepentingan setiap subsistem agribisnis. Dukungan industri pupuk dalam pengembangan sistem agribisnis pada waktu yang akan datang perlu mengembangkan sistem *networking* baik secara vertikal(hulu ke hilir) maupun horizontal (sesama perusahaan pupuk), yaitu penggabungan perusahaan produk pupuk menjadi satu yang dimana sekarang menjadi perusahaan pupuk pemerintah.

Pengembangan sistem agribisnis melalui reposisi koperasi agribisnis. Perlu adanya perubahan fungsi pada koperasi agribisnis yaitu untuk:

1. Meningkatkan proses tawar menawar para anggotanya.
2. Mengoptimalkan pencapaian skala dengan meningkatkan daya saing.
3. Menyediakan jasa dan produk.
4. Meningkatkan peluang pasar.
5. Memperbaiki nilai mutu produk dan jasa.
6. Meningkatkan jumlah pendapatan.
7. Menjadi sarana pengembangan ekonomi masyarakat.

8. Menjadikan koperasi sebagai komunitas organisasi.
9. Melakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Pengembangan sistem agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis dalam membangun sistem informasi agribisnis. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi-informasi produksi, informasi proses, distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.

II.3. Tahapan Pembangunan Sistem Agribisnis di Indonesia.

Tahapan pembangunan sistem agribisnis di Indonesia:

1. Tahap kelimpahan faktor produksi yaitu Sumberdaya Alam dan Tenaga Kerja tidak terdidik, serta dari sisi produk akhir, sebagian besar masih menghasilkan produk primer. Perekonomian berbasis pada pertanian.
2. Digerakkan oleh kekuatan investasi melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan serta industri hulu pada setiap kelompok agribisnis. Tahap ini akan menghasilkan produk akhir yang didominasi padat modal dan tenaga kerja terdidik, sehingga selain menambah nilai tambah juga pangsa pasar internasional. Perekonomian berbasis industri pada agribisnis.
3. Tahap pembangunan sistem agribisnis yang didorong inovasi melalui kemajuan teknologi serta peningkatan Sumberdaya manusia. Tahap ini dicirikan kemajuan pada setiap subsistem agribisnis sehingga teknologi mengikuti pasar. Perekonomian akan beralih dari berbasis Modal ke perekonomian berbasis Teknologi.

4. Pembangunan Ekonomi Desentralistis-Bottom-up, yang mengandalkan industri berbasis Sumberdaya lokal. Pembangunan ekonomi nasional akan terjadi di setiap daerah.

II.4. Dukungan Perbankan Dalam Pengembangan Sistem Agribisnis di Daerah.

Untuk membangun agribisnis di daerah, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah, khususnya pada *on farm* agribisnis. Selama 30 tahun terakhir, keluaran kredit pada *on farm* agribisnis di daerah hanya kurang dari 20 % dari total kredit perbankan. Padahal sekitar 60 % dari penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya pada *on farm* agribisnis.

Kecilnya alokasi kredit juga disebabkan dan diperparah oleh sistem perbankan yang bersifat *Branch Banking System*. Sistem Perbankan yang demikian selama ini, perencanaan skim perkreditan (jenis, besaran, syarat-syarat) ditentukan oleh Pusat bank yang bersangkutan/sifatnya sentralistis, yang biasanya menggunakan standart sektor non agribisnis, sehingga tabungan yang berhasil dihimpun di daerah, akan disetorkan ke pusat, yang nantinya tidak akan kembali ke daerah lagi. Oleh karena itu perlunya reorientasi Perbankan, yaitu dengan merubah sistem perbankan menjadi sistem *Unit Banking system* (UBS), yakni perencanaan skim perkreditan didasarkan pada karakteristik ekonomi lokal. Kebutuhan kredit antara subsistem agribisnis berbeda serta perbedaan juga terjadi pada setiap usaha dan komoditas. Prasyarat agunan kredit juga disesuaikan. Disamping

agunan lahan atau barang modal lainnya, juga bisa penggunaan *Warehouse Receipt System* (WRS) dapat dijadikan alternatif agunan pada petani. WRS adalah suatu sistem penjaminan dan transaksi atas surat tanda bukti (*Warehouse Receipt*).

II.5. Pengembangan Strategi Pemasaran.

Pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting peranannya terutama menghadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan, keadaan pasar heterogen. Dari hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar (konsumen). Sehingga dengan berubahnya paradigma tersebut, maka pengetahuan yang lengkap dan rinci tentang preferensi konsumen pada setiap wilayah, negara, bahkan etnis dalam suatu negara, menjadi sangat penting untuk segmentasi pasar dalam upaya memperluas pasar produk-produk agribisnis yang dihasilkan. Selain itu diperlukan juga pemetaan pasar (*market mapping*) yang didasarkan preferensi konsumen, yang selanjutnya digunakan untuk pemetaan produk (*product mapping*). Selain itu juga bisa dikembangkan strategi pemasaran modern seperti strategi aliansi antar produsen, aliansi produsen-konsumen, yang didasarkan pada kajian mendalam dari segi kekuatan dan kelemahan.

II.6. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis.

Dalam pengembangan sektor agribisnis agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) Agribisnis sebagai aktor pengembangan agribisnis. Dalam pengembangan teknologi, yang perlu dikembangkan adalah pengembangan

teknologi aspek: Bioteknologi, teknologi Ekofarming, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi Informasi. Sehingga peran Litbang sangatlah penting. Untuk mendukung pengembangan jaringan litbang diperlukan pengembangan sistem teknologi informasi yang berperan mengkomunikasikan informasi pasar, mengefektifkan arus informasi antar komponen jaringan, mengkomunikasikan hasil-hasil litbang kepada pengguna langsung dan mengkomunikasikan konsep dan atribut produk agribisnis kepada konsumen.

Dalam pengembangan SDM Agribisnis perlu menuntut kerjasama tim (*team work*) SDM Agribisnis yang harmonis mulai dari SDM Agribisnis pelaku langsung dan SDM Agribisnis pendukung sektor agribisnis.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan diskusi dan partisipasi. Dengan metode pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan solusi kepada pengelolaan poktan yang lebih terstruktur dan terarah. Dengan begitu bersama pengurus desa bagian pertanian, melakukan kegiatan pembinaan dan pembangunan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Desa Gunung Sari.

Desa Gunung Sari merupakan desa yang berada di titik koordinat 106.6891551 BT/ -6.706178 LS dengan jumlah penduduk 14.079 jiwa, yang berprosesi sebagai petani 102 orang dan sebagai buruh tani 618 orang.

Desa Gunung Sari adalah Desa yang berada di wilayah kecamatan pamijahan Negara kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dulunya adalah Gunung Picung dikarenakan jumlah penduduk bertambah banyak, maka terjadilah pemekaran daerah sehingga menjadi Gunung Sari. Sekitar tahun 1976, dimulai tonggak sejarah baru di kawasan Gunung Sari yakni dipimpin oleh lurah Soleh, pada saat itu sebutan Kepala Desa adalah lurah Pada masa lurah Soleh inilah peralihan administrasi dari Gunung Sari ditetapkan oleh Kecamatan Pamijahan, beliau di tetapkan secara pemilihan sepakat oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat pada masa itu.

Desa Gunung Sari memiliki luas wilayah 683,24 Ha, terdiri dari 4 Dusun, 9 RW, 44 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Penduduk desa Gunung Sari berdasarkan data tahun 2019 tercatat sebanyak 14.079 jiwa, sedangkan tahun 2020 tercatat sebanyak 14.200 jiwa. Sehingga dapat dilihat penduduk desa Gunung Sari mengalami peningkatan penduduk sebesar 1,62% dari tahun 2019-2020. Pada umumnya lahan yang berada di Desa Gunung Sari digunakan secara produktif, sebagian besar digunakan untuk pertanian khususnya menanam padi dan untuk wilayah yang dekat dengan air mengalir yang cukup digunakan untuk berternak ikan seperti ikan mas, mujair, nila dan lele dan juga terdapat hutan produktif yang sangat luas. Tetapi tanah di desa ini tidak cocok digunakan untuk berkebun seperti singkong, ubi, jagung, dll dikarenakan tanahnya yang memiliki pH yang asam sehingga tidak cocok untuk menanam tanaman jenis tersebut sehingga sama sekali tidak ada lahan perkebunan yang tercatat dalam profil desa Gunung Sari.

IV.2. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis.

Dalam pengembangan sektor agribisnis agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) Agribisnis sebagai aktor pengembangan agribisnis. Dalam pengembangan teknologi, yang perlu dikembangkan adalah pengembangan teknologi aspek: Bioteknologi, teknologi Ekofarming, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi Informasi, sehingga peran Litbang sangatlah penting. Untuk mendukung pengembangan jaringan litbang diperlukan pengembangan sistem teknologi informasi yang berperan mengkomunikasikan informasi pasar, mengefektifkan arus informasi antar komponen jaringan, mengkomunikasikan hasil-hasil litbang kepada pengguna langsung dan mengkomunikasikan konsep dan atribut produk agribisnis kepada konsumen.

Dalam pengembangan SDM Agribisnis perlu menuntut kerjasama tim (team work) SDM Agribisnis yang harmonis mulai dari SDM Agribisnis pelaku langsung dan SDM Agribisnis pendukung sektor agribisnis.

IV.3. Penataan dan Pengembangan Struktur Agribisnis.

Struktur agribisnis yang tersekat-sekat telah menciptakan masalah transisi dan margin ganda. Oleh karena itu penataan dan pengembangan struktur agribisnis nasional diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu:

1. Mengembangkan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti suatu aliran produk (*Product Line*) sehingga subsektor agribisnis hulu, subsektor agribisnis pertanian primer dan subsektor

agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan manajemen.

2. Mengembangkan organisasi bisnis (ekonomi) petani/koperasi agribisnis yang menangani seluruh kegiatan mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai dengan subsistem agribisnis hilir, agar dapat merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir.

Dalam penataan tersebut, ada 3 bentuk:

1. Pengembangan koperasi agribisnis dimana petani tetap pada subsektor agribisnis usahatani, sementara kegiatan subsektor agribisnis hulu dan hilir ditangani koperasi agribisnis milik petani.
2. Pengembangan Agribisnis Integrasi Vertikal dengan pola usaha patungan (*Joint Venture*). Pada bentuk ini pelaku ekonomi pada subsektor hulu, primer dan hilir yang selama ini dikerjakan sendiri-sendiri harus dikembangkan dalam perusahaan agribisnis bersama yang dikelola oleh orang-orang profesional.
3. Pengembangan Agribisnis Integratif Vertikal dengan pola pemilikan Tunggal/Grup/Publik, yang pembagian keuntungannya didasarkan pada pemilikan saham.

IV.4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Sektor Agribisnis.

Perlu perubahan orientasi lokasi agroindustri dari orientasi pusat-pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku, dalam hal ini untuk mengurangi biaya transportasi dan resiko kerusakan selama pengangkutan. Oleh karena itu perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan yang didasarkan pada peta perkembangan komoditas agribisnis, potensi perkembangan

dan kawasan kerjasama ekonomi. Serta berdasar keunggulan komparatif wilayah.

Perencanaan dan penataan perlu dilakukan secara nasional sehingga akan terlihat dan terpantau keunggulan setiap propinsi dalam menerapkan komoditas agribisnis unggulan yang dilihat secara nasional/kantongkantong komoditas agribisnis unggulan, yang titik akhirnya terbentuk suatu pengembangan kawasan agribisnis komoditas tertentu.

IV.5. Pengembangan Infrastruktur Agribisnis.

Dalam pengembangan pusat pertumbuhan Agribisnis, perlu dukungan pengembangan Infrastruktur seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, darat, sungai dan udara), jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain-lain.

IV.6. Kebijakan terpadu pengembangan agribisnis.

Ada beberapa bentuk kebijakan terpadu dalam pengembangan agribisnis.

1. Kebijakan pengembangan produksi dan produktivitas ditingkat perusahaan.
2. Kebijakan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis.
3. Kebijakan pada tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor.
4. Kebijakan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis.

Beberapa kebijakan operasional untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensi, antara lain:

1. Mengembangkan forum komunikasi yang dapat mengkoordinasikan pelaku-pelaku kegiatan agribisnis

dengan penentu-penentu kegiatan agribisnis dengan penentu-penentu kebijakan yang dapat mempengaruhi sistem agribisnis keseluruhan, atau subsistem didalam agribisnis.

2. Forum tersebut terdiri dari perwakilan departemen terkait.
3. Mengembangkan dan menguatkan asosiasi pengusaha agribisnis.
4. Mengembangkan kegiatan masing-masing subsistem agribisnis untuk meningkatkan produktivitas melalui litbang teknologi untuk mendorong pasar domestik dan internasional.

Pengembangan agribisnis berskala kecil. Ada 3 kebijakan yang harus dilakukan adalah:

1. Farming Reorganization.
Reorganisasi jenis kegiatan usaha yang produktif dan diversifikasi usaha yang menyertakan komoditas yang bernilai tinggi serta reorganisasi manajemen usahatani. Dalam hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan yang rata-rata kepemilikan hanya 0,1 Ha.
2. Small-scale Industrial Modernization.
Modernisasi teknologi, modernisasi sistem, organisasi dan manajemen, serta modernisasi dalam pola hubungan dan orientasi pasar.
3. Services Rasionalization.
Pengembangan layanan agribisnis dengan rasionalisasi lembaga penunjang kegiatan agribisnis untuk menuju pada efisiensi dan daya saing lembaga tersebut. Terutama adalah lembaga keuangan pedesaan, lembaga litbang khususnya penyuluhan.

IV.7. Pembinaan Sumber daya Manusia untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Ekonomi Pedesaan.

Dalam era Agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini perlu reorientasi peran penyuluhan pertanian yang merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Oleh karena itu perlu peningkatan pendidikan penyuluh baik melalui pendidikan formal, kursus singkat, studi banding. Serta perlu perubahan fungsi BPP yang selama ini sebagai lembaga penyuluhan agroteknis, menjadi Klinik Konsultasi Agribisnis. Pemberdayaan sektor agribisnis sebagai upaya penanggulangan krisis pangan dan Devisa.

Perlu langkah-langkah reformasi dalam memberdayakan sektor agribisnis nasional, yaitu:

1. Reformasi strategi dan kebijakan industrialisasi dari industri canggih kepada industri agribisnis domestik.
2. Kebijakan penganekaragaman pola konsumsi berdasar nilai kelangkaan bahan pangan.
3. Reformasi pengelolaan agribisnis yang integratif, yaitu melalui satu Departemen yaitu departemen agribisnis.
4. Pengembangan agribisnis yang integrasi vertikal dari hulu sampai hilir melalui koperasi agribisnis.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan simpulan di atas dapat disimpulkan bahwa agribisnis di Desa Gunung Sari belum syariah dan masih memakai sistem riba atau konvensional maka dari itu peneliti membuat rancangan manajemen agribisnis yang dapat

menunjang berkembangnya potensi tani di Desa Gunung Sari. Sistem sistem yang dirancang tersebut sangat cocok dengan iklim di Desa Gunung Sari di mana gunung sari memiliki potensi yang baik bagi perkembangan tani di Indonesia.

Sistem tersebut meliputi perencanaan pra tanam dan pasca panen, sehingga proses dapat di pantau agar hasil bisa maksimal dan menghasilkan pasca panen sesuai yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Anita, A.S.; & U. Salawati. 2011. *Analisis Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) di Kabupaten Barito Kuala*. Jurnal Agribisnis Perdesaan, 01(04): 285-288.
- Apriyantono, A. 2009. *Kebangkitan Pembangunan Pertanian Indonesia. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia*.
- Apriyantono, A. 2011. *Memory Akhir Jabatan Menteri Pertanian RI 2004-2009*. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan RI.
- Bi, Z. and S.L.D. Pandey. 2011. Comparison of Performance of Microfinance Institutions with Commercial Banks in India. *Australian Journal of Business and Management Research* 1(6): 110-120.
- BPS. 2012. *Data Strategis BPS Indonesia 2012 : Beberapa Indikator Sosial Ekonomi*. Jakarta.
- BPTP Jawa Tengah. 2011. *Laporan Perkembangan LKMA PUAP di*

- Jateng* 2008-2011.
Semarang: BPTP Jateng.
- Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian,
Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian Yogyakarta.
Disampaikan pada Seminar
Mahasiswa pada tanggal 20
Desember 2006 di Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hendiawan, M. 2012. *Laporan
Perkembangan Pelaksanaan
Program PUAP 2008-2011*. Jakarta:
Pusat Pembiayaan Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian RI.
- Hendriawan, M. 2011. *Pedoman Umum
PUAP*. Jakarta: Pusat Pembiayaan
Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian RI.
- Hussein, K. 2010. *Bank-level Stability
Factors and Consume Confidence: A
Comparative Study of
Islamic and Conventional Bank
Product Mix*. Journal of Financial
Services Marketing,
15(3): 259-270. [www.palgrave-
journals.com/fsm](http://www.palgrave-journals.com/fsm).
- Kaluge, D., M.H. Susanto, dan Dwiyo. 2008. *Analisis Fenomenologi Bank
Mendirikan Koperasi
Kredit*. Journal of Indonesian
Applied Economics, 2(1): 1-21.
- Kementan RI. 2010. *Pedoman Umum
Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan*. Jakarta :
Pusat Pembiayaan Ditjen PSP
Kementan RI.
- Keown, A.J., J.D. Martin, J.W. Petty, and
D.F. Scott. 2011. *Manajemen
Keuangan: Prinsip dan
Penerapan. (Marcus Prihmindo
Widodo, Trans)*. Jakarta: Indeks.
- Khan, A.A. 2008. *Islamic Microfinance:
Theory, Policy and Practice*
*Birmingham: Islamic Relief
Worldwide.*
- Khandker, S.R. 2005. *Microfinance and
Poverty: Evidence Using Panel Data
from Bangladesh.*